

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamid S. Attamimi, “*Pancasila; Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*”, dalam Moerdiono dkk., (Editor: Oetojo Oesman dan Alfian), (Jakarta: BP 7 Pusat, 1996)
- A'an Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Alemina Henuk-Kacaribu., *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset (2020)
- Aminoto 2015;3, modul 1 *ilmu negara*
- Asep Sumaryana, Dedi Sukarno., *Pengantar Ilmu Administrasi.*, Universitas Padjadjaran, LP3AN, Jatinangor (2009)
- Bagir Manan (Editor: Ni'matul Huda), *Konvensi Ketatanegaraan.*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006),
- Baharuddin Thahir., *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia.*, Buku Literatur IPDN, 2019
- Buku *eksistensi administrasi publik.pdf*, Diterbitkan oleh badan penerbit Universitas Negeri Makassar (UNM), 2022
- Christine Kansil, CST Kansil Engelen R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009
- Dody Nur Andryan, Buku Ajar *Ilmu Negara sejarah, teori, dan filosofi tujuan negara.*, CV Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta
- Dwight Waldo, terjemahan Bewa Ragawino., *Hukum Administrasi Negara* Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2006
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998)
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016)

- Gerald E. Caiden, *Public Adminstration*, 2nd ED., California palisades Publishers, 1982
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014
- Jimmy Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara (2022)
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Logeman diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pengkereggo *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Iktisar Baru-Van Hoeve, 1975)
- Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2007
- Miftah Toha.,*Dimensi-dimensi prima Ilmu Administrasi negara* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
- Oksidelfa Yanto.,*Negara Hukum kepastian,Keadilan dan Kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana indonesia*
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana 2008
- R Abdoel Djamali, S. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Remaja, I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara* .,Buku Ajar (2017)
- Ridwan HR . *Hukum Administrasi Negara*.,Depok: Rajawali Pers,2018
- Sahya Anggara ,*Ilmu Administrasi Negara*.,CV Pustaka Setia, Bandung 2012
- Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, Gava Media, Yogyakarta, 2012
- Sedermayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung:Alumni, 1992)

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindakan Administrasi Negara* (Bandung: alumni,1992

Solichin Abdul Wahab.,*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: 2008

Sondang P Siagian. *Patalogi Birokrasi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia. 1994.)

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian negara.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

Jurnal:

Abdil Mughis Mudhiffir, *Teori Kekuasaan Michael foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik.*, Jurnal Vol.18: No.1.,2013

Ahmad Arya Saputra, *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance.* Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

- Amin rahmad panjaitan, *Rangkap Jabatan Menteri dalam Kontek Kepentingan Negara Beadasrkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tandfidziyah.*, Jurnal Vol. 6, No2, 2023
- Arini, D. R. (2022). *Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia.* Jurnal Syntax: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 3(2)
- Dhaniswara K. Harjono., *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press 2022)
- Hasan, D. M., Syahril, M. A. F., Tahir, M., Hasdar, H., & Murdiono, M. (2024). *Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?*. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4)
- I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Bioetika Administrasi Publik*”, Jurnal Administrasi Publik “Public Inspiration Vol. 8 No. 2, 2023
- Kurniawan, dkk., “*Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment*”,
- Latifah, S. (2023). *Analisis rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).*
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). *Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo.* Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 8(2).
- May Lim Charity, “*Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Keteatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 Nomor 01 Maret 2016
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006
- Mustamin, M. (2024). *Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Bedasarkan Peraturan Perundang-undangan.* Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1)

- Nibraska, Z. Z., & Faroja, N. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN guna Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Tata Kelola BUMN*. *Dinamika Hukum*, 24(1)
- Nurjanah, P., Gultom, E., & Afriana, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN (Persero) Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2)
- Oktavia, W. A., Afriana, A., & Lubis, T. N. (2019). *Kedudukan akta dan akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan*. *Acta Diurnal. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1),
- Prasetyowati, H., Prananingtyas, P., & Saptono, H. (2017). *Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *Diponegoro Law Journal*, 6(2)
- Sarifudin, A. *Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor yang Beredar di Indonesia.*, (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Simbolon, A. (2012). *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3)
- Tomson Situmeang, *The Concurrent Implications of Government Officials in Indonesia are Viewed from the Concept of Good Goovernance*. (journal Published by Academic Studies Press. Vol 8.3, Fall 2024)
- Wahyuni, T. (2017). *Rangkap jabatan: batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan*. *Policy Paper*. Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN.

Website/Berita Online :

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf> di akses pada 18 November 2024

https://youtu.be/th9u-E60NL4?si=ACLIncoW_bEIHdK2 di akses pada tanggal 28 Desember 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Nur haryanto. Tempo.com/ Pengamat: Jabatan Rangkap, SBY Tidak Demokratis

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 23 Oktober 2019

[https://setkab.go.id/menteri-bolehrangkap-jabatan-parpol-presiden-jokowi-
pendidikan-tinggi-di-bawah-kemendikbud/](https://setkab.go.id/menteri-bolehrangkap-jabatan-parpol-presiden-jokowi-
pendidikan-tinggi-di-bawah-kemendikbud/) diakses pada 22 desember 2024

Website Komisi Pemberantasan Korupsi

Website Ombudsman RI

